

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi telah melahirkan desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Wujud nyata dari desentralisasi adalah ditetapkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir dirubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Pemberian kewenangan kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan suatu rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Pemberlakuan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat bagi masing-masing daerah untuk mewujudkan itu dengan menyusun rencana pembangunannya baik itu jangka panjang, menengah dan tahunan.

Sejalan dengan itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai eksekusi dari perencanaan pembangunan daerah, perlu membuat sebuah rencana strategis yang mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan menengah daerah. Rencana Startegis SKPD adalah sebagai kontrak politik SKPD dengan Kepala Daerah untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dalam lingkup teknis SKPD.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau sebagai salah satu SKPD dibawah Pemerintah Provinsi Riau adalah instansi teknis yang membina sektor ekonomi di daerah yaitu Sektor Industri dan Perdagangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Riau.

Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Riau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu menetapkan Rencana Strategis yang akan dijadikan pedoman dalam dasar pelaksanaan kegiatan Desentralisasi, Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantu dibidang industri dan perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi Riau.

Penyusunan Rencana Strategis tersebut merupakan penjabaran target-target RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 dengan sangat memperhatikan target-target nasional yang tertuang dalam RPJPN & RPJMN serta mempertimbangkan Rencana strategis yang disusun oleh Kementerian Terkait di pusat, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan RI.

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat serta hasil dari review terhadap dokumen Renstra-SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada, diperlukan beberapa penyesuaian terhadap dokumen Renstra – SKPD khususnya pada indikator target capaian kinerja dalam rangka percepatan pemenuhan target capaian RPJMD sesuai dengan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan Provinsi Riau.

1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan

Sejalan dengan adanya era reformasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan disegala bidang khususnya pemerintahan telah melahirkan beberapa ketentuan maupun peraturan dalam menjalankan roda pembangunan. Untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Riau tahun

2014-2019 mengacu kepada ketentuan dimaksud antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau;

1.3. Maksud dan Tujuan

Review Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Mempertajam arah dan strategi pembangunan dibidang Industri dan Perdagangan yang akan menjadi dasar pimpinan dan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
2. Mensinkronkan program pembangunan dan Indikator di Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan RPJMD Provinsi Riau dan penyesuaian kegiatan tahunan dengan program pembangunan.
3. Sebagai Dasar bagi aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun dan menyampaikan laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan penyusunan Riview Renstra ini adalah :

1. Memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dengan

kegiatan tahunan berdasarkan program yang dapat dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;

2. Mempermudah upaya untuk melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi, yang berorientasi pada hasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2014 -2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau tahun 2014 - 2019, didalamnya Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau tahun 2014 – 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Stuktur Organisasi.

Menjelaskan secara umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas

Menjelaskan tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan

Menjelaskan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, dan indikator kinerja pelayanan dan indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L, RPJMD Provinsi Riau yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menjelaskan tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi pencapaiannya.

3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga

Menjelaskan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L.

3.4. Telaah Terhadap Rencana Tata Ruang Provinsi Riau dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Riau.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Menjelaskan isu strategis berdasarkan tahun rencana.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Menjelaskan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Menjelaskan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun.

4.3. Strategi dan Kebijakan.

Menjelaskan Strategi dan Kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Menjelaskan program dan kegiatan

5.2. Indikator Kinerja.

Menjelaskan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

Menguraikan rangkuman tentang hal-hal pokok yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019 sebagai arah kebijakan dalam pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Provinsi Riau , yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2015.

Didalam Peraturan tersebut tertuang mengenai Tupoksi bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau mempunyai tugas pokok tugas melaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Industri dan Perdagangan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Untuk menjalan tugas pokok tersebut maka Dinas Perindustrian dan perdagangan berfungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembinaan dan koordinasi pengembangan Industri;
3. Pembinaan dan koordinasi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan luar negeri;
4. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan;

5. Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Struktur Organisasi

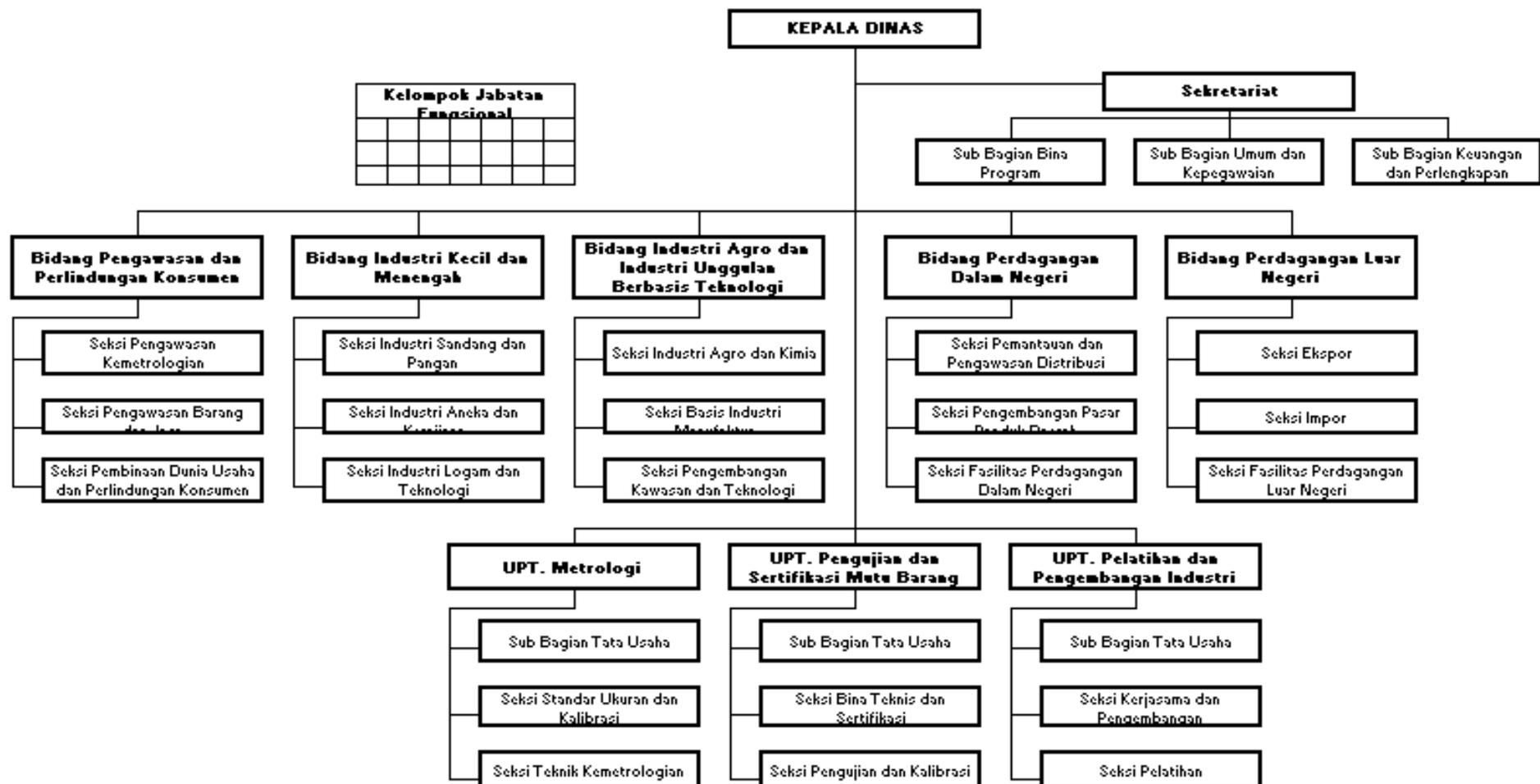
Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi tersebut, struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas membawahi :
 - a. Sub Bagian Bina Program
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan Kemetrolgian
 - b. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa
 - c. Seksi Pembinaan Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen
4. Bidang Industri Kecil dan Menengah membawahi :
 - a. Seksi Industri Sandang dan Pangan;
 - b. Seksi Industri Aneka dan Kerajinan;
 - c. Seksi Industri Logam dan teknologi;
5. Bidang Industri Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi membawahi :
 - a. Seksi Industri Agro dan Kimia.
 - b. Seksi Basis Iindustri Manufaktur
 - c. Seksi Pengembangan Kawasan Teknologi
6. Bidang Perdagangan Dalam Negeri membawahi :
 - a. Seksi Pemantauan dan pengawasan distribusi
 - b. Seksi Pengembangan Pasar Produk Daerah
 - c. Seksi Fasilitas Perdagangan Dalam Negeri
7. Bidang Perdagangan Luar Negeri membawahi :
 - a. Seksi Ekspert;
 - b. Seksi Import;
 - c. Seksi Fasilitasi dan kerjasama Perdagangan Luar Negeri;

8. UPT Pelatihan dan Pengembangan Industri Perdagangan membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelatihan;
 - c. Seksi Kerjasama dan Pengembangan.
9. UPT Metrologi membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Bimbingan Mutu;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis.
10. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Mutu;
 - c. Seksi Teknis Laboratorium.

Berikut ini adalah selengkapnya Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau :

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau



2.2 Sumber Daya SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang industri dan perdagangan maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau pada saat ini memiliki kekuatan aparatur, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai per 31 Maret 2014 menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Pasca Sarjana	16	6	22
2.	Sarjana	51	37	88
3.	Sarjana Muda	5	12	17
4.	SLTA	48	-	48
5.	SLTP	6	30	36
6.	SD/SR	6	3	9
	Jumlah	132	88	220

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Gol. Ruang per 31 Maret 2014

No.	Gol. Ruang	Jumlah	Keterangan
1.	I	24	
2.	II	144	
3.	III	44	
4.	IV	8	
	JUMLAH	220	

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Gol. Ruang per 31 Maret 2014

No.	Pangkat / Gol.Ruang	Jumlah		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	IV/d	-	-	-
2.	IV/c	2	3	5
3.	IV/b	8	1	9
4.	IV/a	8	2	10
		18	6	24
1.	III/d	27	29	46
2.	III/c	10	5	15
3.	III/b	27	18	45
4.	III/a	17	11	28
		81	63	144
1.	II/d	-	1	1
2.	II/c	6	3	9
3.	II/b	10	7	17
4.	II/a	12	5	17
		28	16	44
1.	I/d	2	-	2
2.	I/c	2	1	3
3.	I/b	1	1	2
4.	I/a	1	-	1
	JUMLAH	6	2	8
JUMLAH PEGAWAI (PNS + CPNS)				220

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Struktural /Penjenjangan per 31 Maret 2014

No.	Diklat	Jumlah	Keterangan
1.	Diklatpim Tk.I	-	
2.	Diklatpim Tk.II	-	
3.	Diklatpim Tk.III	6	
4.	ADUMLA	16	
5.	Diklatpim Tk.IV.	37	
	Jumlah	59	

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Fungsional /Penjenjangan per 31 Maret 2014

No.	Jenis Fungsional	Jumlah	Keterangan
1.	Staf	151	
2.	Panera	13	
3.	Penguji Mutu Barang	12	

4.	Penyuluh	11	
5.	Widyaiswara	3	
	Jumlah	190	

Tabel 2.6. Jumlah Pegawai Menurut Urusan per 31 Maret 2014

No.	Urusan	Jumlah	Keterangan
1.	Industri	39	
2.	Perdagangan	107	
	Jumlah	146	

Tabel 2.7. Jumlah Rasio Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Jumlah Pegawai Propinsi per 31 Maret 2014

No.	Urusan	Jumlah	Keterangan
1.	Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan	220	
2.	Pegawai Propinsi Riau	7.786	
	Jumlah	28.3%	

Selain dari sumber daya manusia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau juga memiliki aset/modal berupa tanah, gedung kantor, kendaraan bermotor roda 4 dan 2 serta sarana dan prasarana kerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. sampai dengan Tahun 2013 berikut ini adalah

Tabel 2.8. Rekapitulasi Aset Tetap yang tercatat sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2013 (Rp.)	Keterangan
1.	Tanah	53.500.177.000	
2.	Peralatan dan Mesin	19.844.536.697	
3.	Gedung dan Bangunan	16.576.235.057	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	617.572.153	
5.	Aset Tetap lainnya	146.975.000	
	Jumlah	90.685.495.908	

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Industri dan Perdagangan di masa lalu (2009 - 2013) dapat dilihat pada tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan Rencana Kinerja Utama Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau berikut ini dimana telah menunjukkan beberapa keberhasilan yang dicapai, walaupun ada beberapa indikator yang belum cukup memuaskan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dari hasil analisis Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, RTRW dan KLHS, yang berimplikasi sebagai bagi pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Peradagangan Provinsi Riau maka diidentifikasikan sebagai tantangan adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya infrastruktur yang mendukung aktivitas industri.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan penggunaan produk dalam negeri,
3. Belum terjaminnya kontinuitas bahan baku bagi pengembangan industri pengolahan.
4. Pelaksanaan pasar ASEAN Tahun 2015 dan pasar global lainnya sehingga membanjirnya produk impor/tidak berlabel.
5. Daya saing produk industri untuk nasional ataupun internasional masih rendah.
6. Masih rendahnya inovasi dan penguasaan teknologi oleh Industri Kecil dan menengah
7. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya tertib ukur dan perlindungan konsumen/produsen.

Sementara itu, selain sebagai tantangan era perdagangan bebas dapat juga menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikut ini adalah peluang yang dapat dimanfaatkan :

1. Jumlah penduduk Provinsi Riau yang banyak.
2. Keberagaman potensi industri dan perdagangan di Riau.

3. Adanya akses transportasi nasional dan internasional langsung ke Pekanbaru.
4. Adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang tinggi dari sektor industri pengolahan dan perdagangan.
5. Pelaksanaan pasar ASEAN Tahun 2015 dan pasar global lainnya serta adanya peluang pasar non tradisional.

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Perkembangan Industri di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah Perusahaan yang bergerak di sektor Industri pengolahan. Perusahaan yang bergerak di sektor industri yang terdapat di Provinsi Riau tahun 2011 sebanyak 2015 perusahaan mengalami peningkatan sebesar 22 perusahaan dari tahun 2010, (Tabel 3.2). Keadaan ini menunjukkan bahwa iklim berinvestasi di Provinsi Riau cukup kondusif dan berkembang serta memberikan prospek yang bagus bagi masyarakat Provinsi Riau. Kondisi yang demikian didukung oleh kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan perizinan dengan baik serta bantuan perbankan yang memberikan pinjaman atau kredit.

Tabel 3.1
Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang menurut Klasifikasi Industri Tahun 2008 – 2011 Provinsi Riau

Kode KBLI 2009	Klasifikasi Industri (Unit)	Jumlah Perusahaan (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)
10	Industri Makanan	152	49,665
11/12/13/ 30/32/33	Industri minuman/Industri pengolahan tembakau/Industri tekstil/ Industri alat angkut lainnya/ Industri pengolahan lainnya/ Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	8	911
16	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	6	2,722
17	Industri kertas, barang dari kertas	5	15,752
18	Industri percetakan dan reproduksi media rekam	6	184
20	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	3	514
22	Industri karet, barang dari karet dan plastik	15	2,287
23	Industri barang galian bukan logam	4	160
31	Industri Furnitur	6	780
	Jumlah 2011	205	72,903
	2010	183	51,015
	2009	191	48,202
	2008	191	53,307

Sumber : BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2013)

Peningkatan jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri ini tentunya memberikan dampak bagi terbukanya lapangan pekerjaan. Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja yang dapat diserap berjumlah 51.015 orang yang selanjutnya meningkat menjadi 72,903 orang pada tahun 2012. Ini berarti terjadi penambahan lapangan pekerjaan selama satu tahun sebanyak 21.888 orang.

Sementara itu dilihat dari klasifikasi industri, industri yang terbanyak adalah pada kelompok industri makanan (Kode 10 KBLI 2009) yaitu sebanyak 152 perusahaan diikuti kelompok industri karet, barang dari karet dan barang dari plastik (Kode 22 KBLI 2009) sebanyak 15 perusahaan, klasifikasi industri yang terkecil terdapat di Provinsi Riau adalah industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia (Kode KBLI 20).

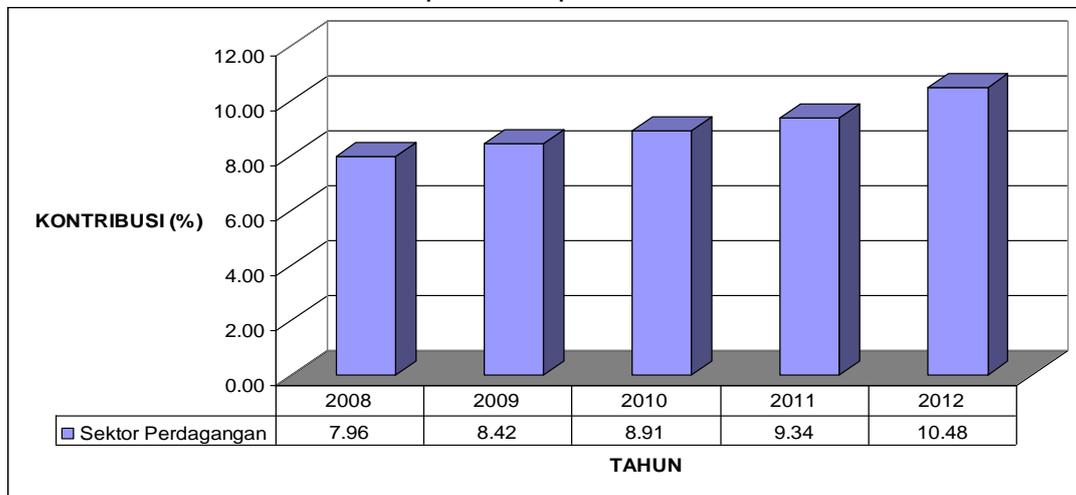
Perkembangan sektor Industri di Provinsi Riau seperti yang diuraikan di atas cukup mengembirakan. Namun demikian pada sisi yang lain masih terdapat permasalahan dalam pengembangannya yang perlu mendapat perhatian. Adapun permasalahan dalam pengembangan sektor industri adalah :

- (1) Pemanfaatan bahan baku lokal rendah;
- (2) Ketersediaan bahan baku produk yang relatif terbatas;
- (3) Inovasi dan daya saing produk masih rendah;
- (4) Kurangnya produktivitas bahan baku substitusi impor;
- (5) SDM serta kompetensi sumber daya manusia pengolah industri yang rendah;
- (6) Penguasaan teknologi masih rendah;
- (7) Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal;
- (8) Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan kerjasama industri belum optimal. (9) Jumlah penyerapan tenaga kerja pada industri besar.

Selanjutnya sektor Sektor Perdagangan Provinsi Riau sebagai bagian dari tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga mengalami

peningkatan yang cukup baik. Selama 5 tahun terakhir kontribusi sektor ini terhadap PDRB selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 kontribusi perdagangan terhadap PDRB sebesar 7,96 % meningkat menjadi 10,48 % tahun 2012 (gambar 3.2). Peningkatan PDRB sektor perdagangan menyebabkan peningkatan produksi global, peningkatan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik, menambah sumber devisa untuk pembangunan ekonomi.

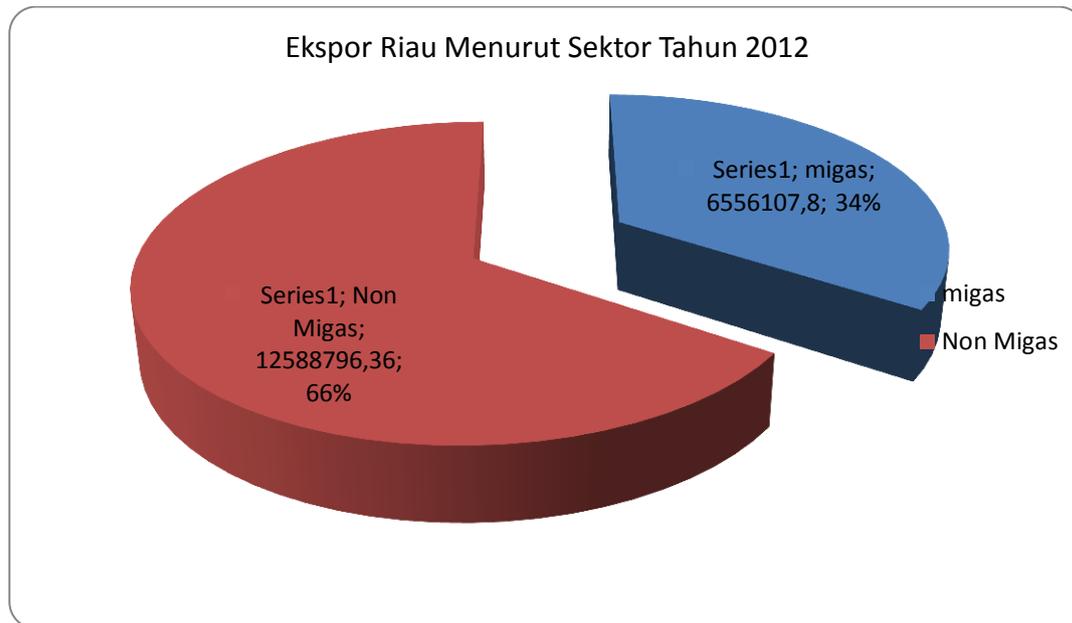
Gambar 3.2. Proporsi Ekspor Riau Menurut Sektor



Gambar 3.2. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2009 – 2012 Provinsi Riau

Nilai ekspor non migas pada tahun 2012 gambar 3.3 sebesar 66 persen lebih besar dari ekspor migas yaitu 34 persen. Ekspor non migas didominasi oleh hasil industri dengan volume ekspor sebesar 15.864.138 kg dan nilai ekspor sebesar US \$12.425.444.

Gambar 3.3. Proporsi Ekspor Riau Menurut Sektor



Sumber : BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2013)

Nilai ekspor migas, relatif tinggi 10 kali lipat dibanding impor namun migas ini adalah *non-renewable resources* yang tidak *sustainable* dalam jangka panjang. Pendapatan daerah dari dana bagi hasil migas yang tidak berkesinambungan ini selayaknya ditopang dengan ekspor non-migas. Sehingga perlu upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan ekspor dari sektor non migas.

Sebagaimana halnya sektor industri, sektor perdagangan juga menghadapi masalah dalam pengembangan. Adapun permasalahan yang dihadapi pengembangan sektor perdagangan :

- (1) Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor;
- (2) Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi yang representatif;
- (3) Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM bidang perdagangan;
- (4) Adanya berbagai pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Infratraktur sarana perhubungan antar daerah yang jelek;
- (6) kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sektor hulu dan hilir tidak jelas.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan janji-politik yang disampaikan pada saat menjadi calon. Tentunya ketika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur janji-janji tersebut wajib diwujudkan dengan program-program pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih untuk Tahun 2014-2019, telah merumuskan Visi dan Misi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Provinsi Riau, yaitu:

“Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja serta Pemantapan Aparatur”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 10 (sepuluh) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan
4. Menurunkan kemiskinan
5. Mewujudkan pemerintahan yang Baik, Profesional (good governance dan clean government) dan Handal
6. Memantapkan pembangunan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa serta pemantapan stabilitas politik
7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan
8. Meningkatkan penataan lingkungan, kebersihan dan pariwisata
9. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan

Berkenaan dengan Misi dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan Misi Keempat Mengentaskan kemiskinan.

Sementara itu program-program strategis sebagai pelaksanaan Visi dan Misi diatas, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

A. Sektor Industri

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
2. Program Penataan struktur Industri.
3. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
4. Program Pengembangan Industri Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi
5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

B. Sektor Perdagangan

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
2. Program Pengembangan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
4. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau terhadap pencapaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

NO	VISI PROVINSI RIAU : TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU YANG MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING TINGGI, TERHAPUSNYA KEMISKINAN SERTA TERSEDIA NYA LAPANGAN KERJA			
	MISI DAN PROGRAM	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
PENGHAMBAT			PENDORONG	
	MISI : KEEMPAT			
	PROGRAM : 1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, 2. Penataan struktur Industri 3. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 4. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 5. Program Pengembangan Agro dan Industri Unggulan berbasis Teknologi 6. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, 7. Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri 8. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 9. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	SEKTOR INDUSTRI 1. Masih rendahnya produktivitas dan kualitas Industri kecil dan menengah; 2. Ketersediaan bahan baku produk yang relative terbatas; 3. Belum tertatanya insdutri secara baik 4. Kompetensi sumber daya manusia pengolah industri yang rendah. SEKTOR PERDAGANGAN : 1. Masih memadainya perlindungan terhadap konsumen 2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang psoedur ekspor dan impor . 3. Belum tertata dengan baik system perdagangan lintas batas; 4. Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi yang representatif; 5. Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM bidang perdagangan;	1. Keterbatasan jumlah Dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program / kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan; 2. Anggaran Provinsi relative terbatas jumlahnya; 3. Keterbatasan sarana dan prasarana UPT; 4. Penggunaan sarana dan prasarana masih belum secara optimal dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif 5. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis 6. Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan 7. Industri kreatif Belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam	1. Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak 2. Tersedianya dan prasarana kerja yang memadai 3. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dan tertelusur 4. Meningkatkan anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi. 5. Tersedianya regulasi industry dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintahan Provinsi 6. Tersedianya data/ informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan 7. Tersedianya Standar operasional prosedur kerja.

			<p>pola;</p> <p>8. Masih lemahnya Daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah,</p> <p>9. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/ bisnis</p> <p>10. Frekuensi, luas jangkauan dan ketersediaan sarana dan prasarana aktivitas pengendalian kepada pemilik Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) dalam penggunaannya masih terbatas, hal ini akan berdampak kepada lemahnya aspek perlindungan konsumen</p>	
--	--	--	---	--

3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga

Arah Kebijakan Industri Nasional jangka panjang mengacu pada RPJPN 2005 - 2025 (Undang-undang N0.17 Tahun 2007) yang selanjutnya secara khusus ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional, sedangkan untuk kebijakan jangka menengah bidang perindustrian sesuai dengan RPJMN 2010-2014 (Perpres Nomor 5 Tahun 2010). Memperhatikan kebijakan yang ada serta perubahan lingkungan strategis baik didalam

negeri maupun diluar negeri, maka dirumuskan kondisi yang diharapkan (sasaran jangka menengah) dalam kurun waktu 2010-2014 yaitu :

- a. terselesaikannya permasalahan yang menghambat dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis;
- b. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja besar;
- c. Terolahnya potensi sumberdaya alam daerah menjadi produk-produk olahan;
- d. Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor;
- e. Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri masa depan
- f. Tumbuh dan berkembangnya IKM khususnya industri menengah sekitar dua kali lebih cepat dari pada industri kecil.

Sejalan dengan implementasi AFTA dan AEC (Asean Economic Community) 2015, masuknya produk-produk impor pada komoditas pangan dan tekstil serta produk tekstil merupakan ancaman tersendiri. Dibutuhkan kebijakan yang sistematis dan menyeluruh untuk menyeimbangkan produk komoditi lokal baik pada sisi produksi, pengolahan sampai dengan distribusi perdagangannya yang akhirnya dikawal melalui pengawasan dan perlindungan konsumen. Dalam rangka melindungi produk lokal perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang terdiri antara lain :

- a. Pengembangan industri kecil dan menengah yang kuat sehingga berperan dalam pembentukan PDB;
- b. Meningkatkan investasi di industri-industri yang padat karya dan menata struktur teknologi industri;
- c. Meningkatkan investasi dan kemampuan inovasi aplikasi teknologi dalam proses pengolahan bahan baku lokal di daerah sehingga produk bahan baku lokal tidak dijual dalam kondisi bahan mentah;
- d. Meningkatkan penguasaan pasar di dalam dan di luar negeri;
- e. Memperkokoh faktor-faktor penunjang pengembangan industri;

- f. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk impor dan barang berbahaya;
- g. Menggalakkan gerakan "*Cinta Produk Dalam Negeri*"

Salah satu rencana aksi yang penting untuk dilaksanakan adalah melakukan revitalisasi industri agar daya saing industri meningkat. Peningkatan daya saing tersebut dilakukan pada sektor hulu maupun hilir.

Selain itu, dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan, sektor industri harus mampu mendukung peningkatan sarana produksi pertanian antara lain (1) Penyediaan pupuk, insektisida, herbisida, alat mesin pertanian, dan lain-lain, (2) Peningkatan produk pangan olahan antara lain melalui pengembangan diversifikasi produk, pengolahan produk buah - buahan, dan (3) Revitalisasi industri gula dalam rangka melaksanakan swasembada gula dalam negeri. Agar dukungan sektor industri optimal, maka industri pupuk akan direvitalisasi dan industri alat pertanian dikembangkan di seluruh daerah, khususnya di sentra-sentra produksi. Hal-hal lain yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan antara lain :

- a. Pengembangan industri pengolahan yang berbahan baku sumber daya alam lokal;
- b. Peningkatan produktivitas pertanian baik intensifikasi maupun ekstensifikasi;
- c. Pengalokasian produksi bahan baku sumber daya alam lokal berdasarkan pengaturan iklim/cuaca beserta penanganan pasca panen;
- d. Pemberian insentif terhadap pengembangan pertanian dan industri pengolahan pangan.

Keberhasilan pengembangan industri sangat tergantung dari dukungan sector ekonomi lainnya seperti penyediaan bahan baku, energi, listrik, jalan dan transportasi, tenaga kerja serta insentif di bidang fiskal, moneter dan regulasi yang mendukung. Oleh karenanya perlu diciptakan kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan dukungan hal-hal

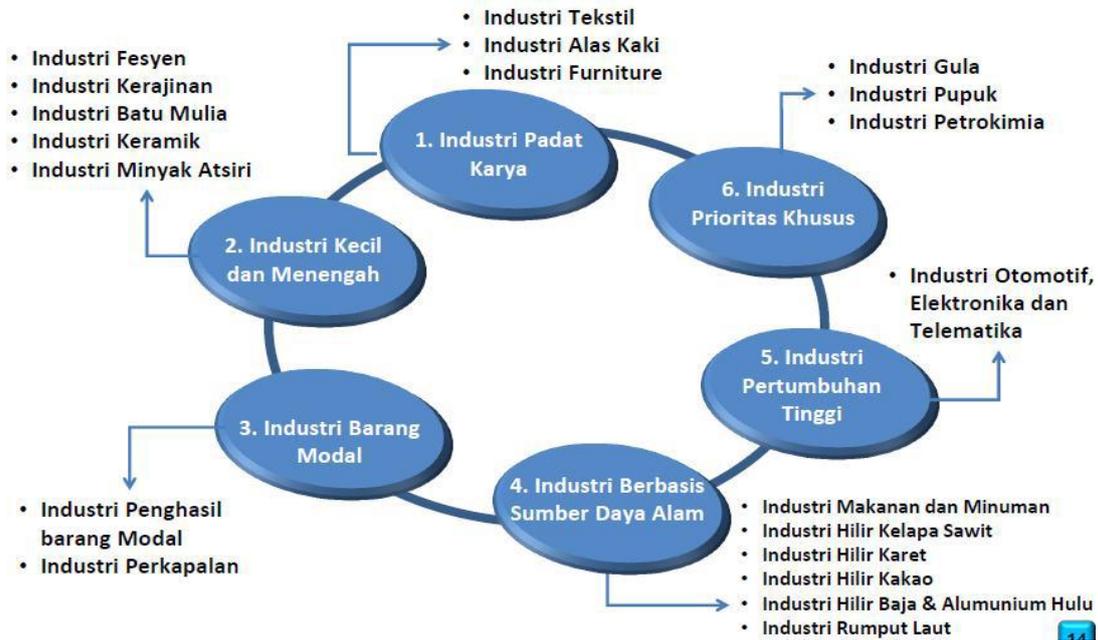
tersebut, khususnya di sentra-sentra produksi dan sentra kegiatan pengembangan kompetensi inti daerah.

Selain hal tersebut diatas, pengembangan industri kreatif menjadi alternatif pengembangan arah industri lainnya. Industri kreatif berbasis komunitas cenderung mudah untuk dikembangkan. Penguatan peran kelompok-kelompok kerja industri kreatif yang telah terbentuk serta pembentukan komunitas baru adalah upaya pengembangan industri kecil dan menengah yang senantiasa dilakukan. Utamanya pada sektor industri kreatif berbasis teknologi informasi. Perkembangan era teknologi informasi yang semakin terbuka dan tidak memandang jarak antar negara, mendukung kreasi dan inovasi produk berbasis teknologi informasi.

Arah Kebijakan Pengembangan Industri Nasional meliputi :

a) Pengembangan Klaster - Klaster Industri Prioritas Nasional ; b) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah. Dalam kedua aspek ini sudah termasuk menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah, mendorong tumbuhnya industri baru yang memperkuat struktur, dan menambah kapasitas terpasang nasional. Selanjutnya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional telah ditindaklanjuti dengan terbitnya 35 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas, dan 18 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi. Pada tahun 2010 - 2014 Kementerian Perindustrian akan memfokuskan 6 (enam) kelompok industri yang mempunyai peluang baik untuk dikembangkan dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1
Pengembangan Klaster Industri Prioritas



Dalam mendorong peningkatan daya saing industri nasional, pemerintah akan menggunakan empat instrumen pendukung yaitu : a) APBN; b) Insentif fiskal; c) Penyediaan infrastruktur kawasan industri; d) Dukungan administratif termasuk mengundang peran swasta dengan skema Public Private Partnership.

Mengenai Bangun Industri Nasional tahun 2025 tersusun dari basis industri manufaktur dan industri andalan masa depan. Basis industri manufaktur yaitu spektrum industri yang telah berkembang saat ini dan telah menjadi tulang punggung sektor industri. Kelompok industri ini keberadaannya masih sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak trampil, yang perlu direstrukturisasi dan diperkuat agar mampu menjadi Industri kelas dunia. Industri-industri Andalan Masa Depan meliputi : a) Industri Agro; b) Industri Alat Angkut; c) Industri Telematika.

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010 - 2014 serta bertumpu pada

keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

"Meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor",

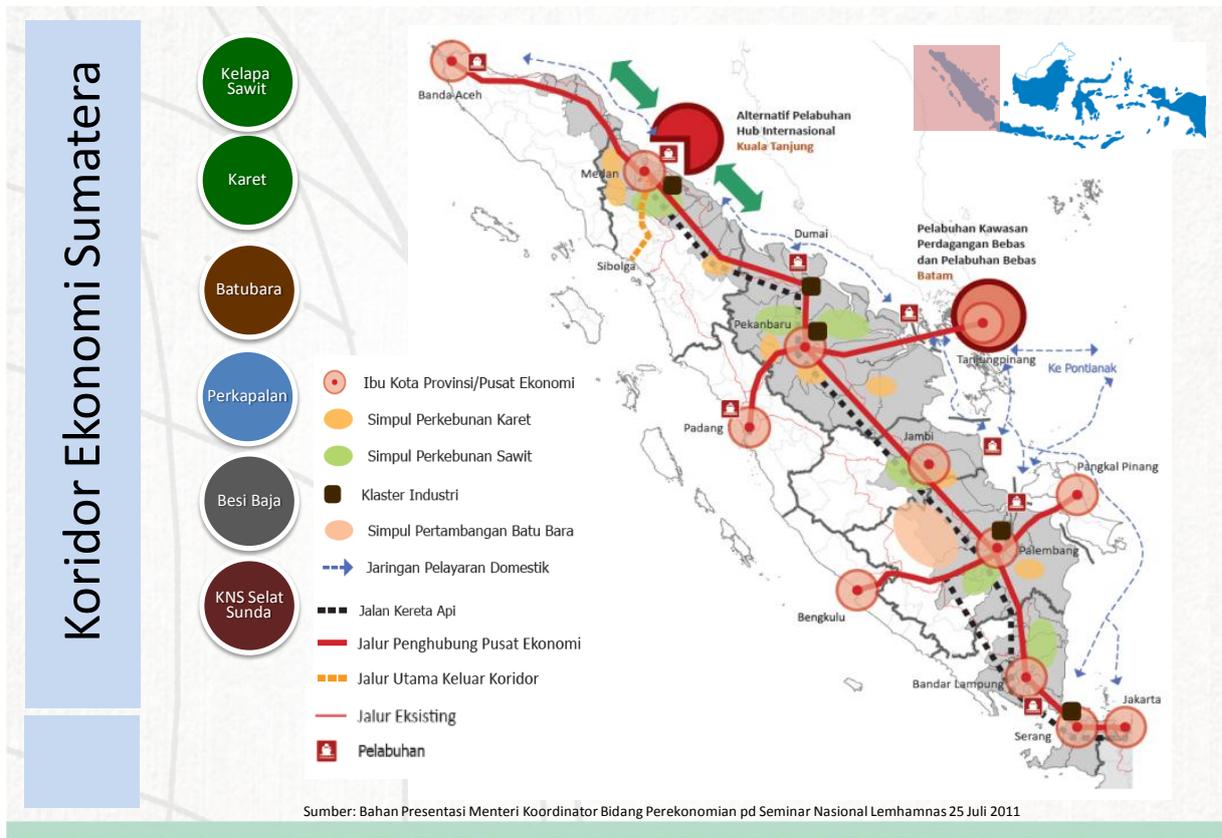
Adapun arah kebijakan pembangunan Perdagangan Dalam Negeri adalah *"Peningkatan penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik".*

Dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan, Misi yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2010 - 2014 adalah :

1. Meningkatkan kinerja ekspor non migas nasional secara berkualitas;
2. Menguatkan pasar dalam negeri;
3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional;
4. Optimalisasi reformasi birokrasi;

Berdasarkan misi tersebut telah dirumuskan sasaran strategis untuk jangka waktu 2010 - 2014 adalah Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, eksklusif dan berkelanjutan dicapai untuk mencapai target sasaran 6 (enam) koridor prioritas nasional sebagai pusat pertumbuhan di setiap pulau dengan pengembangan klaster industri berbasis sumber daya unggulan (komoditi atau sektor). Koridor Jawa akan dijadikan pendorong industri dan jasa nasional. Industri yang akan dikembangkan antara lain dapat dilihat jelas pada gambar 3.3 Koridor Ekonomi Sumatera dibawah ini :

Gambar 3.3 Koridor Ekonomi Sumatera



9

Disamping penetapan 6 koridor, pertumbuhan tinggi yang inklusif dapat dicapai dengan pengintegrasian ekonomi melalui pembangunan” konektivitas” nasional yang diharapkan akan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut sehingga memaksimalkan pertumbuhan ekonomi melalui keterpaduan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan berdasarkan sasaran Renstra K/L

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
I	BIDANG INDUSTRI : 1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional; 2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri; 3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industry; 4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional; 5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi; 6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industry; 7. Menguatnya struktur industry.	BIDANG INDUSTRI : 1. Masih rendahnya produktivitas dan kualitas Industri kecil dan menengah; 2. Ketersediaan bahan baku produk yang relative terbatas; 3. Belum tertatanya insdutri secara baik 4. Kompetensi sumber daya manusia pengolah industri yang rendah	1. Kebijakan teknis Bidang perindustriand an kerjasama industri belum optimal; 2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, 3. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya 4. Penggunaan sarana dan prasarana masih belum secara optimal 5. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing 6. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan 7. Kegiatan belum dapat menyelesaikan permasalahan menahun dan	1. Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak 2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai 3. Meningkatnya Anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi 4. Tersedianya regulasi industry dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah Provinsi 5. Tersedianya data/informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan.

			<p>belum bersifat terobosan dan monumental sesuai kegiatan Tematik Kewilayahan.</p> <p>8. Industri kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam pola pengembangan perekonomian di daerah Kabupaten/ Kota;</p> <p>9. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah,</p> <p>10. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis;</p>	
	<p>BIDANG PERDANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa. 2. Meningkatnya pengmanan perdagangan dan kebijakan nasional untuk mendukung daya saing produk Indonesia baik pasar 	<p>BIDANG PERDAGANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor; 2. Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi yang representatif; 3. Kurang memadainya jumlah maupun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan 2. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya 3. Keterbatasan sarana dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak 2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan public yang memadai dan tertelusur 3. Meningkatnya anggaran belanja dan

	<p>domestik maupun internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk Ekspor. 4. Menurunnya hambatan akses pasar. 5. Meningkatnya Promosi dan Citra Produk Ekspor. 6. Opimalnya kinerja kelembagaan ekspor. 7. Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan. 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana distribusi dan logistik nasional. 9. Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional. 10. Meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang. 11. Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah. 12. Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok. 13. Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan. 14. Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standarisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang dan jasa. 15. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berudaha di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. 16. Meningkatnya 	<p>kualitas SDM bidang perdagangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Adanya berbagai pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. 5. Infratraktur sarana perhubungan antar daerah yang jelek; 6. kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sector hulu dan 	<p>prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis 5. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan. 6. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang ; 7. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/ bisnis; 	<p>anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tersedianya regulasi industry dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah Provinsi 5. Tersedianya data/informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan
--	--	---	--	---

	dukungan kinerja pelayanan publik. 17. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme sumberdaya manusia sektor perdagangan 18. Meningkatnya birokrasi yang transparan dan akuntabel dan bersih. 19. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal.			
--	---	--	--	--

3.4. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2009 - 2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Riau

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2009 - 2029 merupakan penjabaran dari Undang-Undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah ini bertujuan untuk membentuk tata ruang wilayah Provinsi Riau yang efisien, berkelanjutan, dan berdayasaing, dalam rangka mencapai sasaran :

- a. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung 45% dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan.
- b. Tersedianya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis.
- c. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dalam system wilayah yang terintegrasi.
- d. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Pada arahan pengembangan bagi kawasan industri ditekankan pada :

- a. Mengembangkan kawasan industri yang akan direncanakan
- b. Mendorong pengembangan industri kreatif dan telematika.
- c. Memprioritaskan pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi;
- d. Memprioritaskan pengembangan industri yang menerapkan manajemen dan kendali mutu, *clean development mechanism*, serta produksi bersih;

- e. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal.

Untuk arahan pembangunan lokasi industri yang dilakukan di luar kawasan industri atau zona industri, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
- b. Dilengkapi dengan unit pengolahan limbah;
- c. Memperhatikan pasokan air bersih dari sumber air permukaan;
- d. Industri ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan limbah secara terpadu untuk industri dengan lokasi berdekatan.

Dalam hal rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Riau untuk mengoptimalkannya, ditetapkan beberapa rencana pengembangan kawasan industri yang ada di Kabupaten/Kota, diantaranya :

1. Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hilir kelapa Sawit di Kota Dumai
2. Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hilir kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hilir
3. Rencana Pembangunan kawasan Industri Buruk Bakul di Kabupaten Bengkalis
4. Rencanan Pembangunan Kawasan Industri Tenayan di Kota Pekanbaru.
5. Kawasan Industri Tg. Buton di Kabupaten Siak.

Kondisi tersebut merupakan perhatian bagi penyusunan rencana pembangunan dan pendukung pembangunan lainnya. Dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, RTRW menjadi salah satu panduan bagi penetapan wilayah pengembangan program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. Pada Renstra Periode 2014 - 2019, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau akan berfokus pada pengembangan kawasan industri hilir kelapa sawit di pelintung Kota Dumai, di Kuala enok Kabupaten Indragiri Hilir,

Kawasan Industri Tg. Buton serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan suatu analisis untuk mengetahui sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah mampu mendukung pengembangan wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan, dan sebagainya. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau perlu pula memperhatikan dokumen KLHS Provinsi Riau. Hal ini sangat perlu dilakukan agar Pengembangan Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang hendak dilaksanakan meliputi : kebijakan dan strategi pengembangan wilayah; kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; dan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang. Dalam hal kebijakan pengembangan wilayah di Provinsi Riau diwujudkan melalui pembagian Wilayah Pengembangan (WP). Adapun strategi pengembangan wilayah untuk kawasan dilakukan dengan mengendalikan pengembangan wilayah, mendorong pengembangan wilayah, membatasi pengembangan wilayah dan meningkatkan pengembangan wilayah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam membatasi pengembangan wilayah adalah dengan mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan berdasarkan KLHS

NO	ASPEK KAJIAN	RINGKASAN KLHS	IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN SKPD	CATATAN PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alih fungsi lahan (kawasan lindung, suaka alam, pesawahan) menjadi peruntukkan lain yang berbeda dengan fungsi asalnya ▪ Konflik pemanfaatan ruang pada lokasi tertentu sehingga mengganggu keselarasan dan Keseimbangan pembangunan yang 	Memasukkan pertimbangan Lingkungan pada setiap tahap perencanaan program dan kegiatan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadinya penurunan kualitas air sungai dan air permukaan yang diakibatkan oleh Pencemaran limbah inndustry 	Mendorong pelaksanaan Green Industri	
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan DAS secara terpadu melalui mekanisme jasa lingkungan hulu hilir belum diterapkan secara menyeluruh 	Mendorong industry menjaga kelestarian lingkungan	
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadinya over fishing serta eksplorasi sumberdaya ikan masih kurang 	Mendorong pengembangan Industri berbasis ikan hasil budi daya dan perairan lainnya	
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas daptasi terhadap perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya antisipasi aparat pemerintah dalam memahami arti pelestarian, 		

		pengelolaan dan pengendalian Lingkungan hidup untk menghadapi resiko perubahan iklim		
--	--	--	--	--

3.5 Penentuan Isu - isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan hal yang telah dibahas sebelumnya serta masukan dari stakeholder terkait, maka dapat dirumuskan bahwa isu strategis pembangunan daerah Provinsi Riau bidang Industri dan Perdagangan Tahun 2014 - 2019, sebagai berikut :

- a. Kawasan Industri dengan Pelayanan Terintegrasi, Kawasan Industri ber-IPTEK dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- b. Peningkatan Daya Beli.
- c. Pengembangan Komoditi Unggulan,
- d. Modernisasi industri ALSINTAN,
- e. Peningkatan Industri Potensi Lokal.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 adalah untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2019. Dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Provinsi Riau, maka Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu terkait dengan Misi Keempat Menurunkan kemiskinan adalah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN NIAGA YANG TANGGUH,MANDIRI DAN DINAMIS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN SERTA MAMPU BERSAING DI PASAR DOMESTIK DAN GLOBAL".

Untuk mewujudkan visi dalam lima tahun ke depan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau berupaya melaksanakan dan mengusahakan misi guna menjawab pertanyaan apa bisnis atau usaha yang dilakukan dalam lima tahun mendatang.

Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

- ❖ Misi pertama, ***Meningkatkan daya saing industri Provinsi Riau.*** Hal ini untuk menciptakan kemampuan bagi sumber daya industri untuk bersaing di pasar nasional maupun global
- ❖ Misi kedua, ***Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri.*** Hal ini untuk meningkatkan nilai dan volume perdagangan dari Provinsi Riau ke luar negeri.
- ❖ Misi ketiga, ***Meningkatkan kelancaran dan stabilitasi sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan peran kemetrolagian.*** Hal ini untuk menciptakan keseimbangan sistem perdagangan dalam negeri di Provinsi Riau.

- ❖ Misi keempat, ***Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.*** Hal ini untuk menciptakan kemampuan dalam mengawal pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun kedepan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Mewujudkan visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dilakukan melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksi Dinas tersebut diatas, untuk itu perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi dioprasionalkan kedalam tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

Misi pertama : Meningkatkan daya saing industri Provinsi Riau.

Memiliki kemampuan bersaing masa lalu, masa kini dan masa mendatang sebuah lembaga akan dapat tumbuh dan berkembang serta dengan kemampuan yang tinggi sebuah industri dan perdagangan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Sesuai dengan Misi pertama, Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah:

- ❖ *Tujuan* : Meningkatkan produksi dan produktivitas produk-produk industri di wilayah Provinsi Riau.
- ❖ *Sasaran*, sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah :
 1. Meningkatnya Pertumbuhan IKM, Produktifitas dan jumlah produk IKM yang mampu bersaing
 2. Tertatanya struktur industri di Provinsi Riau
 3. Meningkatnya kemampuan dalam teknologi produksi
 4. Meningkatnya wira usaha baru

Misi kedua : Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri

Melaksanakan misi perdagangan luar negeri memerlukan kemampuan bersaing yang tinggi untuk masa kini dan masa mendatang. Dalam perdagangan luar negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau mendorong dan memfasilitasi aktivitas perdagangan agar dapat tumbuh dan berkembang agar mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Sesuai dengan Misi kedua, Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah:

- ❖ *Tujuan* : Mengembangkan promosi dan jejaring kerjasama industri dan perdagangan Provinsi Riau di pasar global.
- ❖ *Sasaran*, sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah :
 1. Meningkatnya ekspor Provinsi Riau.
 2. Meningkatnya jumlah produk-produk ekspor.
 3. Meningkatnya Kerjasama Internasional.
 4. Menurunnya/terjaganya jumlah nilai produk impor.

Misi ketiga : Meningkatkan kelancaran dan stabilitasi sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan peran Kemetrolagian.

Kelancaran distribusi barang di pasar merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas agar jumlah transaksi meningkat, seperti : lelang komoditi agro, efektifitas dan efisiensi distribusi produk-produk IKM di dalam negeri dan diluar negeri memiliki kelancaran dan keamanan yang tinggi. Perlindungan dan pengembangan pasar tradisional meningkatnya peranan kemetrolagian untuk meningkatkan kualitas produk IKM dalam perdagangan dalam negeri.

Sesuai dengan Misi ketiga Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah:

- ❖ *Tujuan* :
 1. Meningkatnya distribusi, promosi, pengamanan dan kerjasama industri dan perdagangan Provinsi Riau di pasar nasional.

2. Meningkatnya perlindungan konsumen dan keamanan pasar dalam negeri dalam distribusi produk.

❖ *Sasaran*, sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelancaran distribusi produk-produk di dalam negeri. Hal ini dapat diukur dari laju inflasi.
2. Meningkatnya keamanan dan tertib ukur produk-produk IKM dalam perdagangan luar dan dalam negeri.
3. Meningkatnya jumlah transaksi lelang komoditi Provinsi Riau. Meningkatnya peranan kemetrolagian untuk meningkatkan kualitas produk dalam perdagangan dalam negeri.
4. Meningkatnya dan berkembangnya pasar tradisional.

Misi keempat : Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.

Memiliki kompetensi sumber daya manusia yang tinggi disertai dengan tersedianya sarana prasarana kerja yang baik dapat mewujudkan sebuah perencanaan yang tepat dan pelaksanaan sistem pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas sebagai upaya mewujudkan kinerja lembaga yang tinggi untuk masa kini dan masa mendatang dan akhirnya tujuan serta sasaran Dinas yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil yang maksimal.

Sesuai dengan *Misi keempat* Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah:

- ❖ *Tujuan* : Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.
- ❖ *Sasaran* : Sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah:
 1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja

4.3. Strategi dan Kebijakan.

Strategi dalam renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau 2014-2019, adalah langkah- langkah upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk itu langkah upaya yang perlu dilakukan adalah:

Misi pertama : Meningkatkan daya saing industri Provinsi

A. Strategi.

1. Meningkatkan daya saing industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri logam mesin dan elektronika).
2. Meningkatkan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri.
3. Medorong memanfaatkan kapabilitas dan potensi alam Provinsi Riau sebagai bahan baku industri IKM.

B. Kebijakan :

1. Memfasilitasi peningkatan kualitas produk unggulan dan kualitas industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri logam mesin dan elektronika).
2. Memfasilitasi peningkatan unit usaha industri kecil menengah dan kemitraan antar industri.

Misi kedua : Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri

A. Strategi.

1. Menumbuhkan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri
2. Meningkatkan kerja sama perdagangan dan promosi luar negeri

B. Kebijakan :

Mendorong dan memfasilitasi perdagangan luar negeri, promosi dagang dan pengembangan pasar luar negeri.

Misi ketiga : Meningkatkan kelancaran dan stabilitasi sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan peran kemetropolitan.

A. Strategi :

1. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta sistem distribusi barang yang efektif dan efisien.
2. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan
3. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen.
4. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta tertib barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).

B. Kebijakan:

1. Mendukung pembangunan pusat gelar produk ekonomi unggulan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
2. Mewujudkan pasar tradisional yang sehat dan bersih melalui revitalisasi pasar
3. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien
4. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan
5. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen dan produsen
6. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur/takar/ timbang dan perlengkapannya
7. Pembangunan Pusat-Pusat Perdagangan kluster Komoditi Unggulan dan Pusat Logistik berbasis Kewilayahan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Program pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Program Penataan Struktur Industri
3. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistim Produksi
4. Program Pengembangan Industri Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi
5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
7. Program Pengembangan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
9. Program Peningkatan Kerjasama Internasional

Adapun rincian program, kegiatan serta Target Indikator dan Pendanaan selama 5 (Lima) Tahun ke depan, Tahun 2014 - 2019, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA (SKPD) YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2019 telah dijabarkan berbagai indikator kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang. Terkait dengan hal tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau juga telah mengidentifikasi beberapa indikator kinerja dalam limatahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja ini diuraikan meliputi dua bidang yaitu bidang industry dan bidang perdagangan yang akan menggambarkan keberhasilan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dalam mengimplementasikan strategi, kebijakan, dan program/kegiatan guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka memperkuat struktur perekonomian yang tangguh di Provinsi Riau.

Di bidang perdagangan indikator kinerja yang memberikan peran yang cukup penting adalah persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, nilai ekspor bersih perdagangan. Untuk bidang industri indikator kinerja yang akan diukur adalah persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB dengan migas dan kontribusi sektor inudtri terhadap PDRB tanpa Migas.. Hasil uraian tersebut di atas dapat lebih jelas dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Industri dan Perdagangan dalam RPJMD

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD 2019
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Industri							
1.	Kontribusi Sektor Industri Migas Terhadap PDRB pada harga konstan (%)	2,4	2,39	2,37	2,34	2,31	2,28	2,28
	Kontribusi Sektor Industri Tanpa Migas Terhadap PDRB pada harga konstan (%)	9,28	9,45	9,62	9,80	9,98	10,16	10,16
A.	Perdagangan							
E.	Eskpor Bersih Termasuk Minyak Bumi (US\$ Juta)	17,557,157.09	17,557,157,09	18,087,822.17	18,359,139.55	18,634,526.69	18,914,044.58	109,109,846.918
F.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	11.07	11.70	12.36	13.06	13.80	14.58	14.58

BAB VII

P E N U T U P

Dengan telah dirumuskannya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Riau Tahun 2014 – 2019 sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan dibidang Perindustrian dan Perdagangan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya. Diharapkan dengan selesainya RENSTRA ini akan dapat mengatur arah perkembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau lima tahun kedepan sehingga dapat meraih keberhasilan dimasa mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 merupakan kelanjutan dari Renstra Tahun 2009 - 2013 yang didalamnya telah disesuaikan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014 - 2019. Disamping itu, dokumen Renstra Dinas telah disesuaikan dengan Renstra Kementerian/Lembaga terkait yang masih berlaku.

Dalam bidang industri dan perdagangan, dinamika perubahan lingkungan strategis relatif cepat berubah, terakhir dengan adanya pengaruh krisis finansial global dan konsekuensi dari kerjasama perdagangan antar Negara/Kawasan seperti Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Asean Economic Community (AEC), maka asumsi-asumsi terhadap perkiraan kondisi makro ekonomi Indonesia telah berubah pula dan perlu adanya terobosan program yang mendesak untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Dalam penyusunan dokumen ini dipertimbangkan pula aspek kontinuitas pelaksanaan kegiatan/program yang belum rampung pada periode sebelumnya, sehingga untuk beberapa kegiatan masih memerlukan dukungan yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya.

Keberhasilan implementasi Renstra ini pada dasarnya sangat tergantung kepada komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, peran serta masyarakat serta para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kepada semua pihak yang terlibat yang membidangi industri dan perdagangan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan industri unggulan daerah dan optimalisasi pasar dalam dan luar negeri di Provinsi Riau pada tahun 2019. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan masukan-masukan dari pejabat-pejabat eselon III dan IV dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Riau.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Provinsi Riau dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan.